



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Jalan Peratun Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang -
Sumatera Utara 20371 www.pttun-medan.go.id, peratun@pttun-medan.go.id

Nomor : 468 /KPTTUN.W1-TUN/RA1.2/VII/2024
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Medan, 3 Juli 2024

Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Di

Medan.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal :

- Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dimaksudkan untuk:
 - Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - Menilai tingkat implementasi (SAKIP).
 - Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
 - Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memperoleh nilai sebesar **78,8 (BB)** atau **SANGAT BAIK**
- Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,9	23,4
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,4	23,4
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12	12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,6 (BB)	78,8 (BB)
			SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

No	Catatan
A. PERENCANAAN KINERJA	
1.	Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja telah tersedia, namun perlu ditambahkan : <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Rencana Aksi. b. Dokumen Renstra Tahun 2023 dan 2024.
2.	Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>), namun ditemukan kondisi : <ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya dokumen Cetak Biru MA dan PKT. b. Belum adanya dokumen SKP seluruh pegawai.
3.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun ditemukan kondisi : <ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya dokumen Analisis Reviu Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) dan surat penetapan Reviu.
B. PENGUKURAN KINERJA	
1.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan, namun terdapat kondisi : <ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya dokumen SOP pengumpulan data capaian kinerja.
2.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun terdapat kondisi : <ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya dokumen Baperjakat. b. Belum adanya dokumen rapat bulanan dan dokumen Rakerda. c. Belum adanya dokumen RKA-KL dan Hasil Rapat Revisi Anggaran.
C. PELAPORAN KINERJA	
1.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, namun ada catatan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya eviden Analisis Dokumen LkjIP.
2.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun ada catatan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya dokumen PK sesuai Target Kinerja.
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun ada catatan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai SK Nomor 878/SEK/VII/2022.
No Rekomendasi	
A. PERENCANAAN KINERJA	
1.	Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja telah tersedia, namun perlu ditambahkan : <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Rencana Aksi. b. Dokumen Renstra Tahun 2023 dan 2024.
2.	Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>), namun perlu ditambahkan : <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Cetak Biru MA dan PKT.

	b. Dokumen SKP seluruh pegawai.
3.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun perlu ditambahkan : a. Dokumen Analisis Reviu Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) dan surat penetapan Reviu.
B. PENGUKURAN KINERJA	
1.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan, namun perlu ditambahkan : a. Dokumen SOP pengumpulan data capaian kinerja.
2.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun perlu ditambahkan : a. Dokumen Baperjakat. b. Dokumen rapat bulanan dan dokumen Rakerda. c. Dokumen RKA-KL dan Hasil Rapat Revisi Anggaran.
C. PELAPORAN KINERJA	
1.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, namun perlu ditambahkan: a. Eviden analisis dokumen LkjIP.
2.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun perlu ditambahkan: a. Dokumen PK sesuai target kinerja.
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun perlu ditambahkan: a. Dokumen pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai SK Nomor 878/SEK/VII/2022.

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tahun 2023, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi
TUN Medan,

ARIFIN MARPAUNG



Tembusan Yth:

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN RI.
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
4. Arsip.